



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Hakim Perintahkan JPU Hadirkan Pengurus Cabor

BENGKULU - Sidang dugaan korupsi dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020 dengan terdakwa Mufron Imron dan Hirwan Fuadi, selanjutnya (Rabu depan) akan menghadirkan sejumlah saksi dari pengurus Cabang Olahraga (Cabor) tergabung dalam KONI Provinsi Bengkulu. Hal ini sesuai perintah Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Salah seorang Tim JPU, Muib, SH* dikonfirmasi **rb.com**, kemarin (13/10) membenarkan. "Iya sesuai perintah majelis hakim. Sidang selanjutnya kita akan hadirkan ketua maupun pengurus dari cabor yang tergabung dalam KONI," kata Muib.

Dia menambahkan, kehadiran pengurus cabor tersebut untuk penelusuran dan permintaan keterangan terkait aliran dana hibah KONI yang juga diperuntukkan untuk setiap cabor. "Kita kejar keterangan terkait penerimaan dana yang diterima oleh masing-masing cabor yang tergabung," ujarnya usai persidangan di PN Tipikor Bengkulu.

Sidang kemarin, masih agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU dalam upaya menguatkan dakwaan yang dibacakan

dalam persidangan perdana akhir September lalu. Diantara saksi yang dihadirkan, Kadispورا Provinsi Bengkulu, Atisar Sulaiman, staf keuangan KONI Provinsi serta dari Bank Bengkulu.

Fakta persidangan dan keterangan saksi, menerangkan bahwa dana hibah sebesar Rp 15 miliar yang masuk ke rekening KONI Provinsi Bengkulu ada Rp 11 miliar lebih yang tidak ada pertanggungjawabannya.

"Dari keterangan sejumlah saksi terutama staf keuangan KONI, dari Rp 15 miliar itu ada sebesar Rp 11 miliar lebih yang tidak ada pertanggungjawaban. Uang ini dikelola langsung oleh Ketua KONI dan bendahara yang saat ini kedua terdakwa," kata JPU.

Sementara itu, Kadispورا Atisar Sulaiman dalam keterangannya di persidangan menjelaskan peran Dispora, yang dalam hal ini hanya memverifikasi proposal awal yang diajukan oleh KONI terkait dana hibah tersebut.

"Saya itu (Diospora) tu-poksinya mengevaluasi proposal. Proposal itu dari KONI ke gubernur kemudian diteruskan ke BPKAD. Nah dari BPKAD baru ke saya, karena saya diminta oleh BPKAD untuk mengevaluasi proposal. Dari anggaran proposal Rp 30 miliar kita evaluasi berubah menjadi Rp 21 miliar. Hanya sebatas itu tugas saya," ujar Atisar.(tok)